

### **BAB III**

## **PROSES DEMOKRATISASI MYANMAR**

#### **A. Upaya Demokratisasi Tahun 1990**

Protes dan demonstrasi semakin sering terjadi dan meluas. Rezim militer mulai didesak oleh berbagai pihak seperti aktifis pro-demokrasi dan juga etnis minoritas yang mengalami penekanan. Semakin banyak pihak yang menginginkan Myanmar berubah menjadi negara demokrasi.

Upaya demokratisasi pun terjadi beberapa kali selama rezim militer berkuasa. Proses yang paling besar dan menyita perhatian terjadi pada tahun 1990 dan 2003. Pada tahun 1990, diselenggarakan pemilihan umum setelah sekitar 30 tahun tidak pernah dilaksanakan. Pemilihan umum ini digunakan oleh rezim militer sebagai “*test case*” bagi pemerintahan militer terhadap sikap masyarakat kepada pemerintah.<sup>65</sup>

Dalam proses menuju pemilihan umum, sekitar 200 partai melakukan registrasi. Dua partai besar yang mengikuti pemilihan umum ini adalah National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan National Unity Party (NUP) yang merupakan partai junta militer pengganti Burmese Socialist Programme Party (BSPP).

Hasil akhir pemilihan umum ini memperlihatkan kemenangan mutlak bagi NLD. Partai ini memperoleh suara terbanyak sebesar 58,7% dan memperoleh 392 kursi dari 492 kursi di pemerintahan. Sedangkan untuk NUP, suara yang berhasil diperoleh hanya sebesar 3% dengan

---

<sup>65</sup> Irewati, Awani. 2007. "Myanmar dan Matinya Pergerakan Demokrasi." *Jurnal Penelitian Politik Vol. 4, No. 1* hlm. 12

memperoleh 10 kursi saja. Gabungan beberapa partai etnis minoritas berhasil memperoleh 60 kursi.<sup>66</sup>

Kemenangan yang diperoleh NLD tidak diakui oleh pemerintah militer. Sejak pelaksanaan pemilihan umum rezim militer semakin represif dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik dan melakukan penahanan bagi orang-orang yang dirasa memberikan ancaman bagi eksistensi pemerintah, termasuk Aung San Suu Kyi.

Junta militer kemudian memberikan pernyataan bahwa tujuan pemilihan umum ini dilakukan adalah sebagai ajang perolehan suara untuk menyetujui pembuatan konstitusi baru, dan bukan ajang pemilihan anggota parlemen.

Kegagalan upaya demokratisasi Myanmar pada tahun 1990 kemudian membuat rezim militer semakin berkuasa dan bertindak sewenang-wenang. Kegiatan pro-demokrasi semakin ditekan, dan etnis minoritas pun banyak yang meninggalkan Myanmar. Sebagian besar dari etnis minoritas keluar dari Myanmar dan menuju Bangladesh dan Thailand agar terhindar dari kejaran militer<sup>67</sup>

## **B. Upaya Demokratisasi Tahun 2003**

Setelah berkuasa selama kurang lebih 40 tahun, pemerintahan Myanmar menyatakan rencananya untuk menerapkan sistem demokrasi di dalam negeri. Di bawah pemerintahan Jenderal Khin Nyunt, militer mengeluarkan *The Seven Step "Roadmap to Discipline Democracy"* pada Agustus 2003. Ketujuh langkah tersebut adalah program politik pemerintah Myanmar dalam upayanya untuk menjadikan Myanmar lebih demokratis.

---

<sup>66</sup> Satyadinata, Kadek Wema. 2014. "Upaya Menuju Demokrasi di Myanmar Tahun 1990." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana* hlm.

<sup>67</sup> Irewati, Awani. Op.cit

Tujuh langkah dalam “*Roadmap to Discipline Democracy*” adalah:

- i) Mengadakan kembali Konvensi Nasional (*National Convention*) yang telah diberhentikan sejak 1996;
- ii) Setelah pembentukan Konvensi Nasional dilakukan, akan dilakukan implementasi langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat terselenggarakannya sistem *disciplined democratic*.
- iii) Melakukan *drafting* sebuah konstitusi baru yang sesuai dengan prinsip dasar yang ditentukan oleh Konvensi Nasional.
- iv) Mengadopsi sebuah konstitusi melalui proses referendum
- v) Menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk Pyithu Hluttaw (badan legislatif) sesuai dengan konstitusi baru.
- vi) Mengadakan pertemuan Hluttaws yang dihadiri oleh anggota Hluttaw sesuai dengan konstitusi yang baru.
- vii) Membangun sebuah negara modern, maju, dan demokratis oleh pemimpin negara yang dipilih oleh Hluttaw; dan pemerintahan serta pihak-pihak sentral lain yang dibentuk oleh Hluttaw.<sup>68</sup>

*Disciplined democracy* dianggap sebagai upaya rezim militer untuk memperkuat kontrol mereka terhadap pemerintahan. Kata disiplin umumnya mengharuskan atau menimbulkan peraturan yang ketat serta larangan dan izin yang kompleks. Dalam dunia militer, prosedur pendisiplinan (*disciplinary procedures*) adalah sesuatu yang umum dalam upaya untuk mengontrol keteraturan dan anggota yang sudah ada. Di sisi lain, demokrasi

---

<sup>68</sup> AIIA. 2010. *Democracy and Discontent: The 2010 Elections in Myanmar*. Policy Commentary, Deakin ACT: Australian Institute of International Affairs hlm.

memberikan kebebasan fundamental dan hak-hak dasar bagi masyarakat di suatu negara. Dengan demikian, “*disciplined democracy*” di Myanmar dapat diartikan bahwa kebebasan fundamental dan hak-hak dasar masyarakat Myanmar akan berada di bawah kontrol pemerintah, yakni militer.<sup>69</sup>

Pemerintah Myanmar memberikan alasan mendasar untuk tidak segera mengadakan reformasi politik. Mereka khawatir jika pada saat itu reformasi dilakukan maka akan memicu terjadinya kekacauan seperti yang terjadi di Irak. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki keyakinan bahwa proses demokrasi ini harus diwujudkan secara berhati-hati, namun tetap pada pendirian tidak akan menyerah pada tekanan internasional.

Junta militer juga beralasan bahwa selama kondisi dalam negeri yang kelompok-kelompok masyarakatnya belum bersatu akan sulit untuk menerapkan demokrasi. Mereka berkomitmen untuk menyatukan semua elemen dan kelompok masyarakat dahulu, baru kemudian dilakukan perubahan atau reformasi.<sup>70</sup>

*Roadmap to disciplined-democracy* mendapat respon dari PBB melalui utusannya untuk Myanmar, Ibrahim Gambari. Gambari mengatakan bahwa *roadmap* milik Myanmar perlu lebih kredibel dan inklusif. PBB juga mendorong diambilnya langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung peningkatan upaya demokratisasi di Myanmar yang bebas dan adil. Selain itu, junta militer didorong untuk

---

<sup>69</sup> Monnews. 2010. *What is Meant by Disciplined Democracy?* 27 Oktober. Diakses April 12, 2018. <http://monnews.org/2010/10/27/what-is-meant-by-disciplined-democracy/>

<sup>70</sup> Irewati, Awani. Loc.cit hlm. 15

membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.<sup>71</sup>

### **C. Pemilihan Umum Tahun 2010 dan Pemilihan Umum Sela Tahun 2012**

#### **a. Pemilihan Umum Presiden Tahun 2010**

Pada November 2010, masyarakat Myanmar melakukan pemilihan umum setelah terakhir kali dilaksanakan 20 tahun sebelumnya. Kembali, pada pemilihan umum ini terjadi penekanan politis dan juga pelanggaran hak asasi manusia, baik sebelum pemilihan umum maupun ketika pemilihan umum berlangsung.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah upaya implementasi dari *seven steps roadmap to disciplined-democracy* yang kelima. Pemilihan umum ini dilakukan setelah National Convention mengeluarkan aturan pemilihan umum yang baru.<sup>72</sup>

Pemilihan umum ini pada awalnya diikuti oleh 42 partai politik setelah diloloskan oleh Union Election Commission (UEC). Kemudian, Komisi tersebut membatalkan keikutsertaan lima partai politik, sehingga tersisa 37 partai politik dan lebih dari 80 calon independen.

Pada bulan April, semua menteri dalam kabinet melakukan pengunduran diri untuk mengikuti

---

<sup>71</sup> Ueno, T. (2008, Februari 28). *U.N. envoy wants 'credible' Myanmar democracy roadmap*. Dipetik April 24, 2018, dari <https://in.reuters.com/article/idINIndia-32201720080228>

<sup>72</sup> Kipgen, Nehnginpa. 2009. *Reconciliation Myanmar Needs*. 29 Desember. Diakses April 24, 2018. [https://web.archive.org/web/20110429005503/http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2009/12/137\\_58118.html](https://web.archive.org/web/20110429005503/http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2009/12/137_58118.html)

pemilihan umum. Pengunduran diri ini juga dilakukan oleh Jenderal Thein Sein yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Myanmar. Thein Sein kemudian membentuk sebuah partai politik baru yang diberi nama Union Solidarity and Development Party (USDP).<sup>73</sup>

Dalam *Burma's 2010 Elections: a Comprehensive Report* yang dipublikasikan oleh Burma Fund UN Office, dilaporkan bahwa telah terjadi *electoral fraud* selama proses pemilihan umum berlangsung: campur tangan dari militer dalam proses kampanye; *vote buying*; *vote rigging*; serta kekerasan, intimidasi, dan penahanan. Komisi Pemilihan Umum Myanmar pun dianggap tidak independen dan tidak melakukan transparansi.<sup>74</sup>

Pemilihan umum ini dimenangkan oleh partai bentukan Thein Sein, yaitu USDP, dengan perolehan suara sebesar 76,5% dan memperoleh 882 dari 1,154 kursi di bikameral dan regional parlemen. Setelah USDP, suara terbesar diperoleh NUP dengan perolehan 64 kursi. Meskipun hasil pemilihan umum ini banyak mendapat penolakan dan tidak diakui, pada tahun 2011, Thein Sein tetap dilantik menjadi presiden sipil dan sejak itu, Myanmar menjadi negara demokrasi.<sup>75</sup> Pemilihan umum ini menjadikan Thein Sein sebagai pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis dengan latar belakangnya sebagai mantan

---

<sup>73</sup> BBCNews. 2010. *Burma leaders 'shed uniforms for polls'*. 27 April. Diakses April 12, 2018. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8646575.stm>

<sup>74</sup> BurmaFund. 2011. *Burma's 2010 Elections: a comprehensive report*. Report, New York: Burma Fund UN Office hlm.

<sup>75</sup> *Ibid*; BBC. 2015. *Timeline: Refroms in Myanmar*. Juli 8. <http://www.bbc.com/news/world-asia-16546688>

anggota militer dan perdana menteri di bawah junta militer.

Merujuk kepada jenis demokratisasi Samuel P. Huntington, maka perubahan rezim Myanmar termasuk ke dalam kategori transformasi. Hal ini dikarenakan proses demokratisasi diawali dan diinisiasi oleh pemerintahan militer. Peralihan rezim Myanmar ini dapat disebut dengan “*regime-initiated liberalization*” atau “*liberation from above*”<sup>76</sup>

#### b. Pemilihan Umum Sela Parlemen Tahun 2012

Setelah terpilih, pemerintahan Presiden Thein Sein mengeluarkan sebuah reformasi politik yang mengejutkan. Thein Sein membebaskan 14,578 tahanan melalui program amnesti dengan 58 di antaranya adalah tahanan politik. Beliau juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi untuk berdiskusi tentang kemungkinan kerja sama. Akhirnya, kedua belah pihak menyetujui untuk saling bekerja sama dalam membangun *common grounds* bagi kepentingan bangsa. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengembalikan NLD dalam politik Myanmar setelah sebelumnya mengundurkan diri.

Pemerintah juga mengamandemen beberapa peraturan tentang partai politik. Amandemen dilakukan dengan mengganti aturan yang mengharuskan semua partai politik menghormati Konstitusi 2008<sup>77</sup>. Selain itu, dilakukan juga

---

<sup>76</sup> Renshaw, Catherine Shanahan. 2013. "Democratic Transformation and Regional Institutions: The Case of Myanmar and ASEAN." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 29-54

<sup>77</sup> Konstitusi 2008 Myanmar adalah konstitusi ketiga yang disahkan setelah tahun 1947 dan 1974. Konstitusi ini adalah

penghilangan peraturan yang melarang seseorang untuk terlibat dalam partai politik jika pernah ditahan di penjara. Perubahan peraturan inilah yang membuat Daw Aung San Suu Kyi bersedia mendaftarkan NLD kembali dalam keikutsertaannya di pemilu sela parlemen tahun 2012.<sup>78</sup> Pelaksanaan pemilihan umum parlemen ini adalah cara pemerintah Myanmar untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjadi negara yang demokratis.

Pemilihan umum parlemen ini dilaksanakan pada April 2012. Proses ini diikuti oleh 17 partai politik, termasuk NLD, NUP dan USDP. Pemilu ini memperebutkan 45 kursi atau kurang lebih 7% dari jumlah kursi di Parlemen yang masih didominasi oleh militer.<sup>79</sup>

Melalui pemilu sela ini, Myanmar berusaha untuk tidak mengulang hal yang sama di tahun 2010, di mana tidak ada pihak internasional yang diizinkan untuk mengamati jalannya pemilihan umum. Untuk pemilu parlemen ini, pemerintah mengundang pengamat-pengamat asing dalam jumlah terbatas

---

hasil konsepsi dari National Convention seperti yang tercantum dalam *Roadmap to Disciplined Democracy*. Junta militer mengumumkan bahwa akan melakukan referendum terhadap konsep dari konstitusi ini. Ketika militer menganggap konstitusi ini akan membawa Myanmar masuk ke dalam era "*discipline-flourishing genuine multiparty democracy*", masyarakat pada saat itu justru menolak dan tidak mendukung dalam referendum yang dilakukan, termasuk Aung San Suu Kyi dan anggota-anggota NLD.

<sup>78</sup> Than, Tin Maung Maung. 2013. "Myanmar's 2012 By-Elections: The Return of NLD." *Southeast Asian Affaris* hlm. 206

<sup>79</sup> Farid, Yuniman. 2012. *Myanmar Gelar Pemilu* . 1 April. Diakses April 23, 2018. <http://www.dw.com/id/myanmar-gelar-pemilu/a-15852601>

untuk menyaksikan jalannya pemilihan umum. Pihak yang diundang antara lain dari: Uni Eropa; Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Amerika Serikat; dan ASEAN. Banyak pihak menyambut baik kebijakan pemerintah ini, tetapi isu pelanggaran dan kecurangan masih diharapkan untuk diawasi dan ditekan.<sup>80</sup>

NLD yang sejak awal sudah diduga akan memenangkan pemilihan ini berhasil memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Dari 45 kursi yang diperebutkan, NLD berhasil memperoleh 43 kursi. Partai Aung San Suu Kyi berhasil memperoleh 66% suara. Sementara partai Presiden Thein Sein, USDP, hanya mendapatkan 27% suara saja.<sup>81</sup>

Meskipun NLD keluar sebagai pemenang dalam *by-election* ini, masih ada beberapa laporan kecurangan yang disampaikan. Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa pemilihan umum tersebut tidak bisa disebut adil jika apa yang terjadi sepanjang proses pemilihan umum itu dijadikan bahan pertimbangan.<sup>82</sup> Di samping semua laporan kecurangan yang ada, beberapa pengamat yang diundang, memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Pengamat dari ASEAN mengatakan bahwa “*the by-elections had been conducted in a ‘free, fair, and transparent manner’*”. Agensi oposisi Mizzima pun menyatakan hal yang serupa, bahwa pemilihan umum

---

<sup>80</sup> Setiawan, Agus. 2012. *Myanmar Undang Pengamat Pemilu Internasional*. 23 Maret. Diakses April 23, 2018. <http://www.dw.com/id/myanmar-undang-pengamat-pemilu-internasional/a-15825842>

<sup>81</sup> Than, Thin Maung Maung, Loc.cit. Hlm. 210

<sup>82</sup> Budiman, Andy. 2012. *Suu Kyi: Pemilu Tak Sepenuhnya Adil*. 20 Maret. Diakses April 23, 2018. <http://www.dw.com/id/suu-kyi-pemilu-tak-sepenuhnya-adil/a-15849248>

parlemen dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang bebas dan adil.<sup>83</sup>

Kemengangan NLD membuat partai ini setidaknya memperoleh 7-8% suara di parlemen. Walaupun kontrol parlemen masih didominasi oleh anggota partai yang didukung oleh militer, keberadaan Aung San Suu Kyi dan partai oposisinya mendapat perhatian lebih di masyarakat dan di parlemen sendiri.<sup>84</sup>

#### **D. Tekanan dan Dukungan Dunia Internasional terhadap Myanmar**

Walaupun inisiasi menjadi negara demokratis muncul dari dalam pemerintahan, proses panjang menuju pengumuman pada tahun 2003 banyak dipengaruhi oleh pihak internasional. Pihak-pihak internasional banyak yang memberikan tekanan dan dukungan sebagai upayanya mempercepat transisi atau proses demokratisasi di Myanmar. Pihak-pihak yang cukup sering mendampingi dan memberikan pengaruh bagi Myanmar adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN. Ketiganya melakukan berbagai pendekatan yang memiliki tujuan untuk menjadikan Myanmar negara demokratis:

##### **1. Amerika Serikat**

Amerika Serikat menjadi salah satu negara Barat yang melakukan penekanan terhadap rezim militer Myanmar. Tindakan ini sesuai dengan berubahnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Sekitar tahun 1977, Amerika

---

<sup>83</sup> Than, Thin Maung Maung, Loc.cit. hlm. 211

<sup>84</sup> Olarn, Kocha. 2012. *Myanmar confirms sweeping election victory for Suu Kyi's party*. 4 April. Diakses April 24, 2018. <https://edition.cnn.com/2012/04/04/world/asia/myanmar-elections/index.html>

Serikat menjadikan isu hak asasi manusia sebagai aspek utama dalam kebijakan luar negerinya melalui kampanye Presiden Carter sebelum terpilih. Setelah berjalan beberapa tahun, ketika Presiden Reagan terpilih menjadi presiden, pemerintahannya mengganti kebijakan luar negerinya menjadi negara yang mempromosikan perubahan demokratis secara aktif baik di negara komunis dan non-komunis.

Saat gelombang demokratisasi ketiga, Amerika Serikat menggunakan berbagai cara politik, ekonomi, diplomatik, dan militer untuk mendorong demokratisasi. Dari sisi ekonomi, Amerika Serikat menggunakan *economic pressures* dan *economic sanctions*, termasuk pembatasan dan pelarangan bantuan, perdagangan, dan investasi. Tekanan dan sanksi ekonomi adalah cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk mempengaruhi Myanmar agar mengubah pemerintahannya menjadi demokratis. Alasan Myanmar menjatuhkan sanksi dan tekanan ekonomi di Myanmar juga disebabkan karena ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di bawah junta militer. Masalah penegakan hak asasi manusia juga menjadi salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang disebarkan di seluruh dunia pada saat itu.<sup>85</sup>

Ketika dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Myanmar menguat, sanksi ekonomi terhadap Myanmar mulai dijatuhkan. Amerika Serikat menjadi salah satu pihak yang menjatuhkan sanksi ekonomi atau embargo ketika rezim militer masih berkuasa. Sanksi ekonomi pertama dikeluarkan pada tahun 1997 dengan melakukan pelarangan terhadap kegiatan investasi asing di Myanmar oleh masyarakat dan perusahaan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2003

---

<sup>85</sup> Huntington, Samuel P. Loc.cit hlm.

dijatuhkan kembali sanksi ekonomi dalam bentuk pelarangan impor terhadap produk-produk tertentu dari Myanmar dan juga pemblokiran kepemilikan properti dari Pemerintah Myanmar di Amerika Serikat. Sanksi ekonomi ini kemudian bertambah hingga tahun 2008, ketika Amerika Serikat melakukan pembekuan aset dan melarang perusahaan Amerika Serikat melakukan bisnis dengan tiga perusahaan Myanmar: Myanmar Pearl Enterprise, Myanmar Gem Enterprise, dan Myanmar Timber Enterprise.<sup>86</sup>

## 2. Uni Eropa

Kebijakan Uni Eropa terhadap Myanmar dilatarbelakangi oleh tujuan yang dianggap baik untuk Myanmar. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk membantu berlangsungnya sebuah pemerintahan sipil yang terlegitimasi dan terpilih secara demokratis. Peralihan ini akan dapat menyelesaikan represi, kekerasan terhadap kebebasan fundamental, dan dapat mengarahkan kepada kemakmuran.<sup>87</sup>

Pada pertengahan tahun 1990-an, mengeluarkan kebijakan yang menekan bagi pemerintahan junta militer di Myanmar. Kebijakan ini dikeluarkan karena junta militer dianggap gagal melakukan reformasi politik dan meningkatkan kualitas hak asasi manusia di dalam negerinya. Kebijakan ini dari tahun ke tahun semakin diperkuat dan diperluas pelaksanaannya.

---

<sup>86</sup> Nixschl, Larry A., dan Martin A. Weiss. 2009. "Burma: Economic Sanctions." *fas.org*. 3 Agustus. Diakses April 10, 2018. <https://fas.org/sgp/crs/row/RS22737.pdf> hlm.

<sup>87</sup> Frittin, Agnes, and Niklas Swanstorm. 2010. *European sanctions against Myanmar*. Policy Brief, Stockholm: Institute for Security and Development Policy. Hlm. 1

Uni Eropa menjatuhkan embargo dalam persenjataan dan mengeluarkan larangan ekspor dari Uni Eropa untuk semua senjata yang mungkin digunakan untuk melakukan represi di dalam negeri Myanmar. Selain itu, Uni Eropa juga mengeluarkan larangan pemberian visa dan membekukan sumber dana di luar negeri milik bagian dari pemerintahan dan keluarganya. Uni Eropa juga melarang perusahaan-perusahaan regionalnya untuk berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara (*state-owned enterprises*). Para petinggi negara-negara Uni Eropa pun dilarang untuk mengunjungi Myanmar.

Di tahun 1998, jangkauan sanksi bagi Myanmar diperluas dalam urusan pelarangan pemberian visa. Pelarangan visa ini kemudian diberlakukan juga bagi seluruh *tourism officials* dan juga pelarangan untuk masuk dan transit bagi seluruh anggota senior dari SPDC. Uni Eropa menyatakan bahwa, jika Myanmar masih gagal dalam mewujudkan rekonsiliasi dalam negerinya, maka akan diberlakukan penguatan dan perluasan pemberkuan aset, pelarangan perjalanan, dan embargo persenjataan.<sup>88</sup>

### 3. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Sebagai asosiasi regional terdekat dengan Myanmar, ASEAN memberikan pengaruh dalam bentuk dukungan bagi Myanmar dalam proses menuju negara demokrasi. Hal ini jauh berbeda dibanding Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memberikan pengaruh berupa tekanan bagi Myanmar.

---

<sup>88</sup> Dosch, Jorn, and Jatswan S. Sidhu. 2015. "The European Union's Myanmar Policy: Focused or Directionless?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Hlm. 90-91

Antara tahun 1990 dan 1997, ASEAN menerapkan strategi yang disebut “*constructive engagement*” dalam melangsungkan hubungannya dengan Myanmar. *Constructive engagement* adalah cara pendekatan melalui dialog dan persuasi dalam upaya mengejar kepentingan strategis dan ekonomi, bersamaan dengan diberikannya dorongan untuk menjalankan reformasi moderat menuju demokrasi liberal. Pendekatan ini memungkinkan diberikannya akses bagi bisnis-bisnis dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia untuk memperoleh bahan-bahan mentah dari Myanmar.

Aspek konstruktif dari pendekatan ini dimaksudkan menjadi dua bagian: sosialisasi bagi elit-elit di Myanmar terhadap *good governance* dan perubahan bertahap menuju liberalisasi; investasi finansial yang diharapkan dapat mengarahkan kepada pembangunan sosio-ekonomi dan pembentukan kelas menengah baru secara demokratis.

Pendekatan ini mendapat respon baik dari elit Myanmar yang berkuasa. *Constructive engagement* dirasa sangat cocok untuk mencapai tujuan meningkatkan investasi regional dalam negeri, selagi mengatasi kritik dari dalam negeri. Walaupun jenderal-jenderal di Myanmar tidak menyetujui *constructive engagement* ini digunakan untuk mengubah Myanmar. Menteri Luar Negeri Myanmar pada saat itu, Ohn Gyaw, mengatakan bahwa dengan *constructive engagement* berarti ASEAN akan memandang Myanmar lebih setara. Myanmar memandang bahwa manfaat utama dari pendekatan dengan ASEAN ini adalah untuk memperluas hubungan ekonominya, dan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan dengan Tiongkok yang tidak seimbang.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Renshaw, Catherine Shanahan. Loc.cit hlm. 37

ASEAN lebih mengedepankan penyebaran pengaruh demokratisasi bagi Myanmar secara tidak langsung dibanding dengan intervensi langsung. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan momentum pengimplementasian ASEAN Economic Community (AEC). Upaya ini dimulai sejak tahun 2007 di mana cetak biru AEC resmi ditandatangani.

AEC sendiri memiliki empat pilar yang saling berhubungan dan mutually-reinforcing: “(1) *Single market and production base*, (2) *Competitive Economic Region*, (3) *Equitable Economic Development*, and (4) *ASEAN’s Integration into the Global Economy*”.

Pilar AEC poin 3 dan 4 secara tidak langsung membuat Myanmar harus memperbaiki kondisi dalam negerinya jika ingin dapat menjalankan AEC dengan baik. Untuk mewujudkan sebuah pembangunan ekonomi yang baik, maka Myanmar sendiri harus memastikan bahwa di dalam negerinya sudah ada upaya untuk mewujudkan stabilitas politik. Hal ini berpengaruh bagi kegiatan perekonomian, seperti investasi asing. Karena keadaan dalam negeri suatu negara akan berpengaruh pada perilaku investor.

Poin empat mengenai integrasi dengan ekonomi global juga akan membuat Myanmar harus membuka diri dan pasarnya. Karena dengan membuka pasarnya, kegiatan perekonomian, dan kerjasama ekonomi (perdagangan, dialong, dll.) akan dapat terlaksana.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Ramaditya, F. (2014, Oktober 29). *THE ROLES OF ASEAN IN MYANMAR DEMOCRATIZATION*. Diambil kembali dari Repository UMY: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/9587/bab%20iv.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Mengingat di tahun 2007, Myanmar masih membatasi kegiatan perkeonomian internasionalnya.